

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan tekanan pemangku kepentingan komprehensif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2024, diperoleh simpulan bahwa:

1. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, faktor ukuran perusahaan bukanlah determinan utama, melainkan kewajiban regulasi menjadi faktor yang lebih menonjol.
2. Tekanan pemegang saham memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan mayoritas yang signifikan cenderung menyajikan laporan berkelanjutan dengan kualitas yang lebih tinggi.
3. Tekanan karyawan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang beroperasi di sektor padat karya, cenderung menyusun laporan berkelanjutan dengan pengungkapan yang lebih komprehensif dan detail.
4. Tekanan konsumen memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor yang berhubungan langsung dengan konsumen memiliki tingkat eksposur publik yang tinggi, sehingga lebih rentan terhadap sorotan, kritik, dan tuntutan dari masyarakat.
5. Tekanan kreditur tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perhatian kreditur terhadap aspek keberlanjutan perusahaan relatif rendah, sehingga tidak menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan kualitas pengungkapan laporan berkelanjutan.

6. Eksposur media memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas pemberitaan media mengenai suatu perusahaan, semakin besar pula dorongan bagi perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas pengungkapan dalam laporan berkelanjutan.
7. Tekanan pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya porsi kepemilikan saham oleh pemerintah tidak serta-merta mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan

6.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa perusahaan yang belum merilis laporan berkelanjutan pada tahun 2020. Hal tersebut menyebabkan jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini menjadi terbatas.
2. Dalam penelitian ini, terdapat perusahaan yang sudah merilis laporan berkelanjutan selama periode penelitian tapi tidak melampirkan Indeks POJK No. 51/POJK.03.2017. Hal tersebut menyebabkan jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini menjadi terbatas.
3. Dalam penelitian ini, belum memasukan aspek variabel ekspour media secara lebih komprehensif. Pengukuran dilakukan hanya dengan menghitung jumlah pemberitaan yang muncul mengenai perusahaan, tanpa mempertimbangkan konten atau valensi pemberitaan (apakah bersifat positif, netral, atau negatif).

6.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa saran terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Dapat menambah variabel lainnya yang mampu memengaruhi kualitas laporan berkelanjutan karena dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-squared* (R^2)) adalah sebesar 0,509660 atau

50,96% di mana hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lainnya yang memengaruhi kualitas laporan berkelanjutan. Variabel tambahan yang bisa dipertimbangkan, misalnya:

- 1) Kinerja keuangan, perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik cenderung memiliki sumber daya lebih besar untuk dialokasikan pada penyusunan laporan berkelanjutan yang lebih berkualitas, baik dari sisi konten maupun kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, kinerja keuangan yang positif juga meningkatkan insentif perusahaan untuk menjaga reputasi melalui pengungkapan yang lebih transparan dan komprehensif.
- 2) Umur perusahaan, hal ini sering dianggap sebagai cerminan dari pengalaman dan kematangan organisasi dalam mengelola operasi maupun hubungan dengan pemangku kepentingan. Perusahaan yang telah beroperasi lebih lama biasanya memiliki sistem pelaporan yang lebih mapan serta pemahaman yang lebih baik mengenai tuntutan keberlanjutan. Hal ini dapat mendorong kualitas laporan berkelanjutan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang relatif baru berdiri.
- 3) Tata kelola perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) memastikan adanya mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Mekanisme ini dapat meningkatkan kualitas informasi yang diungkapkan dalam laporan berkelanjutan, karena perusahaan dengan praktik tata kelola yang baik cenderung lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan informasi pemangku kepentingan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan berperan penting sebagai faktor penentu transparansi dan kredibilitas laporan berkelanjutan.

Dengan menambahkan faktor-faktor tersebut, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kualitas laporan berkelanjutan di Indonesia.

- b. Dapat mempertimbangkan kembali jumlah pemberitaan di mesin pencari, yaitu *Google* sebagai indikator untuk media ekspsur. Namun, tidak hanya memperhitungkan kuantitas berita, tetapi juga kualitas atau valensi pemberitaan, apakah bersifat positif atau negatif. Hal ini penting karena intensitas pemberitaan negatif berpotensi menimbulkan tekanan lebih besar bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan berkelanjutan, sedangkan pemberitaan positif lebih merefleksikan bentuk pengakuan atas kinerja yang sudah baik. Dengan memasukkan dimensi tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap kualitas pengungkapan berkelanjutan perusahaan. Dari sisi teknik pengolahan dan analisis data, penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan metode *text mining* atau *natural language processing* (NLP) untuk melakukan analisis sentimen sehingga dapat mengklasifikasikan berita ke dalam kategori positif, netral, maupun negatif secara lebih objektif.

2. Bagi instansi

- a. Berdasarkan rata-rata kualitas laporan berkelanjutan periode 2020 – 2024 yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, perusahaan perlu terus memperkuat strategi pengungkapan agar kualitas laporan semakin optimal dan tidak hanya memenuhi standar minimum. Upaya meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan dapat dilakukan melalui langkah-langkah nyata, seperti menyusun laporan berkelanjutan sesuai dengan standar Peraturan OJK (POJK) tentang Keberlanjutan maupun standar internasional, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI). Penerapan standar tersebut akan membantu perusahaan dalam menyajikan

informasi yang lebih terstruktur, transparan, dan dapat diperbandingkan, baik di tingkat nasional maupun global.

- b. Dapat melakukan audit atau *assurance* keberlanjutan secara berkala oleh pihak independen guna meningkatkan kredibilitas, akurasi, dan keandalan laporan, sehingga informasi yang diungkapkan dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan.

3. Bagi regulator

- a. Diharapkan dapat menetapkan standar pengungkapan yang lebih komprehensif dan seragam guna meningkatkan kualitas laporan berkelanjutan perusahaan. Penyusunan standar sebaiknya mengacu pada praktik internasional, seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* atau *International Sustainability Standards Board (ISSB)*, namun tetap disesuaikan dengan konteks regulasi nasional agar relevan dan aplikatif.
- b. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan perusahaan-perusahaan di Indonesia berorientasi pada lingkungan melalui langkah-langkah konkret. Misalnya, dengan memperketat penerapan regulasi seperti PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) karena berdasarkan sampel penelitian hanya 27 perusahaan yang merupakan peserta PROPER, mewajibkan laporan berkelanjutan sesuai standar POJK No. 51/POJK.03/2017 atau GRI, serta memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan lingkungan.
- c. Dapat memberikan insentif, seperti penghargaan kepada perusahaan yang berhasil menerapkan praktik ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya memaksa kepatuhan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku perusahaan agar melihat aspek lingkungan sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar kewajiban administratif.
- d. Dapat menyediakan program sosialisasi, pelatihan, serta panduan teknis agar perusahaan memiliki kapasitas memadai dalam menyusun

laporan berkelanjutan. Langkah ini akan mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi pengungkapan, sehingga laporan berkelanjutan tidak hanya menjadi kewajiban formalitas, tetapi juga instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta daya saing perusahaan di pasar global.